IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN KAIMANA: STUDI TENTANG PARTISIPASI SUKU ASLI KAIMANA DALAM PEMBANGUNAN

Zainuddin Rahmat Watora
NPP. 33.1227
Prodi Studi Kebijakan Publik
Email: zainuddin@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Ely Sukmana, S. H., M. H.
Email: elysukmana@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement (Research Gap): *The author focuses on the suboptimal implementation of regional autonomy policy in Kaimana Regency, where policy communication remains predominantly top-down and neglects local cultural contexts, resulting in symbolic and ceremonial participation of indigenous tribes across key development stages despite making up 62 percent of the total population.* ***Purpose:*** *This study aims to analyze the implementation of regional autonomy policy in fostering the participation of the indigenous tribes of Kaimana in regional development.* ***Method:*** *This study employs a qualitative descriptive-analytical approach, collecting data through in-depth interviews, observation, and documentary studies involving local government officials, customary leaders, village apparatuses, and indigenous community members, which are analyzed using the interactive model by Miles, Huberman, and Saldaña (2014) alongside Cohen and Uphoff's (1980) participation stages.* ***Result:*** *This study found that regional autonomy policy implementation is not yet optimal due to top-down communication, limited budget allocations, lack of customary facilitators, and a fragmented bureaucratic structure, causing the participation of Kaimana's indigenous tribes in decision-making, implementation, benefit utilization, and evaluation to remain largely symbolic and ceremonial, constrained by difficult geographical conditions and low human resource capacity despite strong customary institutions and Special Autonomy Funds.* ***Conclusion:*** *This study concludes that the low participation reflects a policy implementation that has not been fully adaptive to the local socio-cultural context, necessitating recommendations such as appointing customary facilitators in every district, increasing Special Autonomy Fund allocations for indigenous empowerment, and establishing a dedicated unit within Bappeda to handle indigenous affairs and community participation.*

Keywords: *Indigenous community participation; Kaimana indigenous tribes; Policy implementation; Public policy; Regional autonomy.*

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian/*Research Gap*): Penulis berfokus pada belum optimalnya implementasi kebijakan otonomi daerah di Kabupaten Kaimana, di mana komunikasi kebijakan masih bersifat *top-down* dan mengabaikan konteks budaya lokal, sehingga mengakibatkan keterlibatan suku asli Kaimana dalam tahapan pembangunan masih bersifat simbolis dan seremonial meskipun populasi mereka mendominasi hingga 62 persen dari total penduduk kabupaten. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan otonomi daerah di Kabupaten Kaimana dalam mendorong partisipasi suku asli Kaimana dalam pembangunan. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap pejabat pemerintah daerah, tokoh adat, aparat kampung, serta masyarakat adat, yang kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) serta kerangka tahapan partisipasi Cohen dan Uphoff (1980). **Hasil/Temuan:** Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan otonomi daerah di Kabupaten Kaimana belum berjalan optimal akibat komunikasi yang searah, alokasi anggaran yang terbatas, minimnya fasilitator adat, dan fragmentasi birokrasi, sehingga partisipasi suku asli dalam tahapan pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi masih rendah dan seremonial, didukung oleh kelembagaan adat yang kuat namun terhambat kondisi geografis dan rendahnya kapasitas SDM formal. **Kesimpulan:** Penelitian ini menyimpulkan bahwa rendahnya partisipasi suku asli mencerminkan implementasi kebijakan otonomi daerah yang belum adaptif terhadap konteks sosial-budaya lokal, sehingga disarankan bagi pemerintah daerah untuk mengangkat fasilitator adat di setiap distrik, meningkatkan alokasi Dana Otsus untuk pemberdayaan masyarakat adat, serta membentuk unit khusus di Bappeda yang menangani urusan adat dan partisipasi masyarakat.

Kata kunci: Implementasi kebijakan; Kebijakan publik; Otonomi daerah; Partisipasi masyarakat adat; Suku asli Kaimana.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Implementasi kebijakan otonomi daerah di Indonesia merupakan manifestasi dari semangat desentralisasi yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal. Kebijakan ini memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat berdasarkan potensi dan karakteristik daerah masing-masing sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Djohan dkk., 2024). Kebijakan desentralisasi fiskal dan urusan pemerintahan tersebut pada dasarnya diharapkan dapat mempercepat pembangunan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata di seluruh pelosok daerah (Jeddawi dkk., 2025; Sinurat dkk., 2025). Secara global, tata kelola pemerintahan melalui regulasi desentralisasi memegang peranan penting dalam mengoptimalkan efisiensi alokasi sumber daya publik di tingkat lokal (Bardhan, 2002).

Pelaksanaan otonomi daerah dalam konteks Indonesia bagian timur, khususnya Provinsi Papua Barat, memiliki kompleksitas tersendiri yang sangat tinggi. Keberadaan masyarakat adat dengan sistem nilai, norma, dan kelembagaan tradisional yang masih mengakar kuat menuntut pendekatan kebijakan yang tidak hanya bersifat teknokratis-administratif, melainkan harus sensitif terhadap aspek sosial-budaya setempat (Sutiyo dkk., 2024). Dinamika hubungan politik antara otoritas pusat dan daerah dalam tata kelola asimetris ini kerap kali memengaruhi konsistensi pencapaian target desentralisasi secara struktural (Crook, 2003). Implementasi kebijakan publik pada dasarnya tidak dapat dilepaskan begitu saja dari konteks sosial-politik di mana kebijakan tersebut dioperasikan (Masrich & Yahya, 2015; Peters, 2021). Keberhasilan dari pencapaian tujuan kebijakan desentralisasi ini sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah untuk melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat lokal dan komunitas adat, ke dalam siklus proses pembangunan (Howlett et al., 2020).

Kabupaten Kaimana sebagai salah satu daerah otonom di Provinsi Papua Barat memiliki karakteristik unik dengan keberadaan delapan suku asli, yaitu Suku Koiwai, Irarutu, Mairasi, Madewana, Miere, Oburauw, Kambrau, dan Namatota. Karakteristik keragaman ini menjadi modal sosial sekaligus tantangan nyata dalam implementasi kebijakan otonomi daerah, terutama dalam mendorong keterlibatan aktif masyarakat adat dalam pembangunan daerah. Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kaimana tahun 2024 menunjukkan populasi delapan suku asli ini mencapai 62 persen dari total penduduk kabupaten, namun tingkat partisipasi mereka dalam forum perencanaan formal masih sangat rendah, yaitu hanya berkisar 35 persen dari total peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kampung. Partisipasi masyarakat, khususnya masyarakat adat, merupakan elemen fundamental dalam kerangka otonomi daerah agar masyarakat tidak sekadar menjadi objek pembangunan, melainkan dapat menempatkan diri sebagai subjek yang menentukan arah kebijakan (Arnstein, 1969). Mekanisme keterlibatan publik yang terstruktur ini terbukti memiliki variasi tingkatan pengaruh yang signifikan dalam sistem tata kelola pemerintahan kontemporer (Fung, 2006). Idealnya, keterlibatan kolektif masyarakat tersebut harus menyentuh empat tahapan utama secara konsisten, yang meliputi tahap pengambilan keputusan, tahap pelaksanaan, tahapan menerima manfaat, hingga tahap evaluasi program (Cohen & Uphoff, 1980).

Kondisi riil di lapangan menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat suku asli Kaimana dalam pembangunan daerah masih menghadapi berbagai kendala struktural maupun kultural yang cukup pelik. Hambatan tersebut meliputi minimnya akses informasi program bagi masyarakat pedalaman, dominasi elite lokal dalam forum musyawarah, rendahnya kapasitas sumber daya manusia adat dalam forum teknokratis, serta lemahnya pengakuan formal terhadap kelembagaan dan pengetahuan lokal. Kondisi geografis wilayah yang terdiri dari kepulauan, perbukitan, dan hutan terpencil dengan aksesibilitas infrastruktur yang minim turut memperparah isolasi distribusi informasi pembangunan tersebut. Pemerintah Kabupaten Kaimana memerlukan pergeseran paradigma birokrasi dan pendekatan kultural yang inklusif agar pelaksanaan otonomi daerah dapat menghasilkan proses pemberdayaan yang sejati. Evaluasi kritis terhadap kebijakan pembangunan partisipatif menunjukkan bahwa kegagalan penyerapan aspirasi lokal sering kali disebabkan oleh ketidakmampuan instrumen formal dalam mengakomodasi suara kelompok marginal di tingkat operasional (Cornwall, 2003). Proses pemberdayaan dalam pembangunan daerah harus dimaknai sebagai upaya yang sengaja dirancang untuk memungkinkan kelompok-kelompok masyarakat yang termarjinalkan mampu mengakses sumber daya dan mengontrol keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka (Friedmann, 1992). Konstelasi dan pemetaan akses sosiologis terhadap sumber daya ini pada dasarnya dipengaruhi oleh relasi kuasa yang berjalan di dalam komunitas hukum adat itu sendiri (Ribot & Peluso, 2003).

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (*Research Gap*)

Penulis berfokus pada permasalahan belum optimalnya implementasi kebijakan otonomi daerah yang berdampak pada rendahnya tingkat dan kualitas partisipasi suku asli Kaimana dalam proses pembangunan daerah. Fenomena ini menjadi sebuah kesenjangan yang ironis mengingat regulasi Otonomi Khusus Papua Barat menuntut pembangunan berbasis penghormatan hak adat, ditambah dengan fakta demografis bahwa populasi delapan suku asli mencakup mayoritas mutlak, yakni 62 persen dari total penduduk Kabupaten Kaimana. Keterlibatan masyarakat adat dalam forum perencanaan formal masih sangat terbatas, terbukti dari rata-rata kehadiran mereka yang hanya mencapai 35 persen dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat kampung. Faktor keterbatasan kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu hambatan internal utama yang melatarbelakangi masalah ini, di mana angka melek huruf di wilayah kampung adat terpencil rata-rata baru menyentuh 68 persen, berada jauh di bawah rata-rata tingkat kabupaten yang sudah mencapai 79 persen. Rendahnya tingkat pendidikan formal ini menyebabkan para tokoh dan masyarakat adat kesulitan untuk berinteraksi, memahami, maupun menyalurkan aspirasi ke dalam format perencanaan pembangunan formal yang cenderung bersifat teknokratis-administratif.

Kondisi geografis Kabupaten Kaimana yang sangat ekstrem dan terfragmentasi menjadi kendala struktural berikutnya yang memperlebar jarak sosiologis antara pemerintah daerah dengan komunitas lokal. Wilayah Kaimana yang terdiri dari 676 pulau dan bentang alam perbukitan menyulitkan penyebaran informasi kebijakan secara merata. Keterisolasian ini dipertegas oleh data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana yang menunjukkan bahwa hanya 45 persen kampung yang memiliki akses jalur darat yang layak, sementara sisanya masih bergantung sepenuhnya pada transportasi laut dan sungai yang sangat rentan terhadap perubahan cuaca. Hambatan fisik ini memicu pembengkakan biaya akomodasi yang sangat tinggi bagi masyarakat kampung pedalaman. Biaya transportasi dari wilayah terpencil seperti Kampung Buruway menuju pusat kota Kaimana untuk menghadiri forum pembangunan formal dapat mencapai Rp1.000.000,00 per orang. Kondisi finansial yang berat ini secara langsung menyebabkan penurunan drastis tingkat kehadiran tokoh adat dalam siklus Musrenbang, yang semula mencapai 78 persen di tingkat kampung, menurun menjadi 45 persen di tingkat distrik, dan menyusut hingga tersisa 23 persen di tingkat kabupaten.

Kualitas keterlibatan yang bersifat semu (*tokenism*) menempatkan posisi suku asli Kaimana sekadar sebagai objek legitimasi seremonial dalam pembangunan formal. Aspirasi yang diutarakan oleh masyarakat adat kerap kali diabaikan oleh para pelaksana kebijakan birokrasi yang masih menggunakan pendekatan *top-down* dan kurang memiliki sensitivitas budaya. Kesenjangan kualitas ini terlihat nyata dari catatan dokumen notulen Musrenbang Kabupaten Kaimana, di mana dari total 47 usulan pembangunan yang diajukan oleh lembaga dan tokoh adat, hanya 9 usulan atau sekitar 19 persen saja yang berhasil diakomodasi ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sebagian besar program pembangunan yang berhasil disetujui pun didominasi oleh proyek infrastruktur fisik dari kontraktor luar, sementara usulan pemberdayaan ekonomi berbasis kearifan lokal seperti pengakuan hak ulayat dan pengelolaan sumber daya alam tradisional tidak mendapatkan tindak lanjut yang nyata.

Meskipun berbagai studi terdahulu telah membahas efektivitas regulasi otonomi khusus, dampak alokasi belanja daerah, dan pendekatan kultural sosiologis masyarakat di wilayah Papua secara makro, masih terdapat keterbatasan penelitian yang secara khusus mengkaji pengaruh hambatan geografis, biaya sosiologis, dan kesenjangan literasi birokrasi terhadap pola partisipasi masyarakat adat dalam siklus pembangunan daerah. Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut (*research gap*)

dengan menganalisis secara mendalam dinamika relasi kuasa dan implementasi kebijakan otonomi daerah dalam mendorong partisipasi delapan suku asli Kaimana berdasarkan empat tahapan pembangunan yang inklusif.

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran empiris serta evaluasi mendalam mengenai implementasi kebijakan otonomi daerah dalam membuka ruang partisipasi bagi masyarakat suku asli Kaimana dalam siklus pembangunan daerah. Hasil penelitian ini secara praktis krusial bagi Pemerintah Kabupaten Kaimana sebagai landasan ilmiah untuk merumuskan strategi pembangunan dan pemberdayaan yang efektif, meningkatkan posisi tawar masyarakat adat, serta memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan kajian ilmu pemerintahan di wilayah dengan karakteristik kelembagaan adat yang kuat. Apabila penelitian ini tidak dilaksanakan, maka pemerintah daerah dan para pemangku kebijakan akan terus kekurangan dasar empiris yang kuat dalam memahami celah antara regulasi formal dan praktik nyata di lapangan. Kondisi tersebut berisiko membuat perumusan strategi pembangunan daerah berjalan tidak tepat sasaran, tidak adaptif, serta tetap terjebak dalam pendekatan *top-down* yang rawan mengabaikan faktor kendala geografis, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, serta pengakuan terhadap sistem pengetahuan lokal. Akibatnya, upaya untuk membangun sinergi antara sistem pemerintahan formal dengan sistem sosial-budaya masyarakat adat akan berjalan kurang optimal, sehingga berpotensi menghambat terciptanya pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan di Kabupaten Kaimana.

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa kajian terdahulu yang mengulas implementasi kebijakan desentralisasi, otonomi khusus, serta dinamika partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah . Literatur terdahulu menunjukkan bahwa kajian mengenai otonomi daerah dan pemberdayaan masyarakat memiliki variasi fokus, metode, serta pendekatan teoretis yang sangat beragam. Kajian mengenai dampak desentralisasi secara makro dilakukan melalui analisis kuantitatif regresi data panel mengenai pengaruh alokasi belanja daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Tengah, dengan temuan bahwa alokasi anggaran yang tepat sasaran efektif meningkatkan kualitas layanan publik pada era otonomi (Sasana, 2012). Kajian tersebut menitikberatkan perhatian pada aspek kuantitatif belanja daerah, tetapi memiliki perbedaan mendasar dengan penelitian ini karena belum mengeksplorasi dimensi sosiologis partisipasi masyarakat adat secara kualitatif di lapangan.

Analisis lain mengenai implementasi kebijakan otonomi daerah menggunakan metode kualitatif deskriptif mengungkap bahwa perubahan atau pergantian kebijakan otonomi daerah sangat mungkin terjadi mengikuti rezim yang berkuasa, sehingga pemerintahan daerah yang kuat dan stabil masih merupakan sesuatu yang jauh dari harapan (Faisal, 2013). Kajian tersebut memberikan perspektif kritis terhadap dinamika kebijakan otonomi daerah, tetapi memiliki keterbatasan karena tidak menganalisis secara spesifik dampak regulasi desentralisasi terhadap partisipasi masyarakat adat dalam pembangunan daerah.

Karakteristik masyarakat adat dan pendekatan kultural-sosiologis juga telah dianalisis untuk memotret pola perilaku komunitas lokal dalam merespons kebijakan pemerintah . Penelitian mengenai kesadaran kritis (*consciousness raising*) dan partisipasi politik suku Baduy menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat adat masih bersifat magis atau

semi-intransitif yang ditandai oleh kepatuhan normatif terhadap aturan pemerintah (Moenawar dkk., 2019).

Evaluasi kebijakan Otonomi Khusus di ranah operasional birokrasi Papua juga menjadi fokus perhatian akademik yang krusial. Identifikasi tingkatan partisipasi masyarakat dalam program Otsus di Kota Sorong secara kualitatif deskriptif-analitis menghasilkan kesimpulan bahwa keterlibatan masyarakat dapat ditingkatkan secara optimal melalui peran fasilitator lapangan dan dana stimulus (Sangkek dkk., 2017). Sementara itu, tata kelola implementasi kebijakan Otsus secara lebih terstruktur dianalisis menggunakan dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi dengan kesimpulan perlunya perubahan paradigma birokrasi demi memastikan kesejahteraan masyarakat Papua (Salmawati dkk., 2024). Kedua studi tersebut memiliki persamaan yang sangat erat dengan kajian peneliti karena sama-sama menganalisis kebijakan Otonomi Khusus di tanah Papua menggunakan indikator sosiologis maupun administratif, tetapi terdapat perbedaan karena belum secara mendalam mengeksplorasi dinamika kultural dari delapan suku asli spesifik yang mendiami wilayah administratif kepulauan.

Secara umum, literatur terdahulu masih menyisakan celah penelitian (*research gap*) yang signifikan karena cenderung terfragmentasi antara pendekatan kuantitatif yang bersifat formal-administratif dan pendekatan sosiologis makro, tanpa mengintegrasikan peran kelembagaan adat ke dalam instrumen birokrasi perencanaan . Keterbatasan mendasar dari kelima studi di atas adalah belum adanya analisis komprehensif yang menguji hubungan kausal antara kualitas implementasi kebijakan otonomi daerah dan empat tahapan partisipasi masyarakat adat pada satu lokus dengan pluralitas suku asli yang spesifik . Posisi penelitian saat ini hadir untuk mengisi celah ilmiah tersebut dengan mengambil lokus di Kabupaten Kaimana, memadukan kerangka analisis tata kelola operasional birokrasi dengan model partisipasi sosiologis guna mengeksplorasi kesenjangan (*gap*) antara regulasi formal dan realitas empiris demi menghasilkan rekomendasi strategi pembangunan yang berbasis kearifan lokal secara inklusif.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang memiliki perbedaan eksplisit dan belum pernah dilakukan oleh penelitian-penelitian terdahulu, sehingga menawarkan kebaruan ilmiah (*scientific novelty*) yang signifikan dari segi integrasi teori, metodologi, maupun karakteristik objek penelitian. Kebaruan teoritis dalam penelitian ini terletak pada penggabungan secara terstruktur antara dimensi administrasi publik dalam teori implementasi kebijakan model Edwards III (1980) yang membedah aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi dengan kerangka sosiologis partisipasi masyarakat adat dari Cohen dan Uphoff (1980) yang mengukur empat tahapan keterlibatan secara sirkular. Desain integrasi teoretis ini secara tegas membedakan penelitian peneliti dengan studi terdahulu yang murni menguji variabel ekonometrik belanja daerah secara kuantitatif (Sasana, 2012), serta studi terdahulu yang hanya berfokus pada konsep kesadaran kritis sosiologis masyarakat adat tanpa menyentuh instrumen kebijakan tata kelola birokrasi (Moenawar, 2019). Sinergitas dua teori ini juga mengisi keterbatasan model evaluasi kebijakan otonomi daerah pada penelitian terdahulu yang belum mengukur secara presisi kualitas keterlibatan masyarakat pada setiap tahapan pembangunan daerah (Faisal, 2013; Salmawati dkk., 2024).

Kebaruan metodologis dan karakteristik objek penelitian ini tercermin secara nyata dari lokus dan spesifikasi subjek yang diteliti, yaitu analisis mendalam terhadap pola partisipasi delapan suku asli (suku Koiwai, Irarutu, Mairasi, Madewana, Miere, Oburauw, Kambrau, dan Kuri) di Kabupaten Kaimana. Pendekatan kualitatif deskriptif-analitis dengan model interaktif tertentu (Miles et al., 2014) digunakan untuk memetakan secara konkret kesenjangan (*gap*) sosiologis, seperti pembengkakan

biaya akomodasi transportasi laut akibat isolasi geografis wilayah kepulauan serta hambatan literasi formal tokoh adat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang bersifat teknokratis. Fokus pada pluralitas tata nilai delapan suku asli di wilayah administratif kepulauan ini membedakan secara riil dari penelitian terdahulu yang mengambil lokus wilayah perkotaan heterogen di Kota Sorong (Sangkek dkk., 2017), serta penelitian terdahulu yang memiliki fokus kajian makro nasional yang berbeda (Faisal, 2013). Melalui penekanan perbedaan tersebut, penelitian ini memosisikan diri sebagai kajian ilmiah pertama yang secara eksplisit membongkar fenomena *tokenism* (partisipasi semu) masyarakat adat dalam siklus kebijakan otonomi daerah di wilayah kepulauan Provinsi Papua Barat.

1.6. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan otonomi daerah di Kabupaten Kaimana dalam mendorong partisipasi suku asli Kaimana dalam pembangunan.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis untuk memahami secara mendalam fenomena implementasi kebijakan otonomi daerah dan partisipasi masyarakat adat dalam pembangunan di Kabupaten Kaimana. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada kebutuhan penelitian untuk tidak hanya menggambarkan kondisi riil di lapangan, melainkan juga menganalisis pola, hubungan kausal, serta faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi kompleksitas fenomena sosial tersebut. Pendekatan kualitatif deskriptif-analitis dinilai paling tepat karena memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam perspektif, pengalaman langsung, dan makna yang dikonstruksi oleh para aktor birokrasi maupun masyarakat adat yang tidak dapat dijelaskan secara utuh jika hanya menggunakan data numerik semata (Nurdin & Hartati, 2019).

Pengumpulan data dilakukan melalui kombinasi teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi partisipatif non-peserta (*non-participant observation*), dan studi dokumentasi untuk memperoleh data primer dan sekunder secara komprehensif. Pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan secara sengaja menggunakan teknik *purposive sampling* yang kemudian dikembangkan dengan teknik *snowball sampling* hingga mencapai prinsip saturasi data (*data saturation*) (Simangunsong, 2017). Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kaimana dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung (DPMPK) ditetapkan sebagai informan kunci (*key informants*) karena memiliki otoritas regulasi, kewenangan kebijakan, serta informasi utama mengenai implementasi otonomi daerah dan pengelolaan Dana Otonomi Khusus. Peneliti juga melibatkan unsur Kepala Distrik, Kepala Kampung, tokoh adat atau kepala suku (*ondoafi*) dari delapan suku asli Kaimana, perwakilan masyarakat (unsur laki-laki, perempuan, dan generasi muda), serta aktivis LSM lokal guna memperoleh gambaran informasi yang utuh dan berimbang dari sisi pembuat kebijakan, pelaksana teknis, maupun masyarakat selaku penerima manfaat program .

Teknik pengujian keabsahan data dalam penelitian kualitatif ini diterapkan melalui strategi triangulasi yang ketat untuk menjamin kredibilitas dan objektifitas hasil penelitian. Triangulasi sumber

dilakukan dengan membandingkan dan menguji kembali derajat kepercayaan data yang diperoleh secara silang antara pihak pemerintah daerah, masyarakat hukum adat, dan organisasi masyarakat sipil. Triangulasi metode ditempuh dengan memverifikasi kesesuaian antara hasil wawancara mendalam informan, catatan lapangan (*field notes*) dari observasi langsung forum Musrenbang, serta substansi dokumen kebijakan formal (Ardieansyah dkk., 2023). Peneliti juga menggunakan triangulasi teori untuk membandingkan temuan empiris di lapangan dengan perspektif teori implementasi kebijakan Edwards III (1980) dan teori tahapan partisipasi Cohen dan Uphoff (1980) demi menghindari bias subjektif peneliti.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang bergerak secara siklus sejak awal pengumpulan data di lapangan (Miles et al., 2014). Proses analisis kualitatif tersebut dijalankan melalui empat tahapan utama yang meliputi pengumpulan data, kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), serta penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kondensasi data dilakukan melalui proses pengodean ketat yang mencakup tahap *open coding*, *axial coding*, dan *selective coding* terhadap transkrip verbatim untuk mengelompokkan data ke dalam kategori dimensi penelitian. Penyajian data diwujudkan secara sistematis ke dalam bentuk matriks, diagram jaringan (*network diagram*), bagan alur birokrasi, serta penggunaan kutipan verbatim (*verbatim quotation*) informan yang representatif untuk memperkuat narasi pembuktian bab hasil dan pembahasan.

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah administratif Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, dengan memfokuskan lokus amatan pada dinas teknis operasional serta kampung-kampung adat yang dihuni oleh komunitas delapan suku asli. Pengumpulan data lapangan dan penyusunan laporan riset secara keseluruhan dilaksanakan selama kurang lebih dua bulan pada rentang tahun akademik 2025/2026 dengan mengacu pada Kalender Akademik Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Alokasi waktu tersebut dimanfaatkan secara efektif untuk melakukan pengamatan situasi secara objektif, menyebarkan instrumen pedoman wawancara kepada seluruh kategori informan, serta mengompilasi dokumen laporan kinerja instansi yang aktual dan kontekstual.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis implementasi kebijakan otonomi daerah dan bentuk partisipasi suku asli Kaimana dalam pembangunan menggunakan kombinasi model teori implementasi kebijakan Edwards III (1980) dan kerangka tahapan partisipasi masyarakat dari Cohen dan Uphoff (1980). Edwards III membedah empat dimensi krusial operasional birokrasi yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Di sisi lain, Cohen dan Uphoff mengukur tingkat keterlibatan masyarakat pada tahap pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, hingga evaluasi. Hasil analisis data kualitatif serta temuan empiris lapangan disajikan secara naratif dalam subbab-subbab dimensi di bawah ini.

3.1. Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah di Kabupaten Kaimana

3.1.1 Dimensi Komunikasi

Penyampaian kebijakan otonomi daerah dan otonomi khusus kepada masyarakat suku asli secara garis besar dilakukan melalui tiga saluran utama, yaitu forum Musyawarah Perencanaan

Pembangunan (Musrenbang) berjenjang, penugasan perangkat distrik serta kampung, dan pelibatan Dewan Adat sebagai jembatan struktural. Proses transmisi pesan tersebut berjalan tidak efektif karena terhambat oleh kendala geografis wilayah yang luas dan terdiri dari 676 pulau, sehingga kunjungan sosialisasi ke kampung terpencil hanya terlaksana satu kali dalam setahun. Kejelasan pesan juga mengalami bias karena dokumen formal yang digunakan birokrasi masih bersifat teknokratis serta menggunakan bahasa Indonesia, sedangkan mayoritas masyarakat adat di pedalaman, khususnya generasi tua, memiliki keterbatasan literasi formal dan lebih fasih menggunakan bahasa lokal. Peneliti mencatat bahwa tingkat pemahaman masyarakat suku asli terhadap hak-hak konstitusional mereka dalam kerangka otonomi khusus masih sangat rendah akibat lemahnya dimensi komunikasi ini, yang berujung pada tidak optimalnya keterlibatan mereka

3.1.2 Dimensi Sumber Daya

Pengukuran pada dimensi sumber daya memperlihatkan adanya kesenjangan yang lebar antara ketersediaan finansial daerah dengan pemanfaatannya di ranah pemberdayaan komunitas lokal. Total anggaran Dana Otonomi Khusus yang diterima oleh Kabupaten Kaimana pada tahun anggaran 2025 berada pada angka Rp48.000.000.000,00, namun alokasi yang disalurkan secara langsung untuk program pemberdayaan masyarakat adat hanya menyerap 12 persen atau setara Rp5.700.000.000,00 karena sebagian besar dana terserap untuk infrastruktur fisik makro. Keterbatasan ini diperparah oleh ketiadaan fasilitator adat resmi di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mampu mengasimilasi program birokrasi dengan tata nilai kebudayaan suku asli. Dampak nyata dari tidak adanya fasilitator ini terlihat dari beberapa kegagalan program, seperti salah sasaran dalam penyaluran bantuan benih sayuran yang tidak cocok dengan karakteristik tanah lokal serta kebiasaan makan suku asli. Kondisi infrastruktur transportasi publik juga sangat minim di mana data menunjukkan baru 45 persen kampung yang terhubung oleh akses jalan darat layak, sedangkan 55 persen sisanya bergantung pada jalur laut dan sungai yang memicu pembengkakan biaya akomodasi hingga mencapai Rp1.000.000,00 per orang untuk sekali perjalanan menuju pusat kabupaten.

3.1.3 Dimensi Disposisi

Sikap pelaksana kebijakan secara normatif telah mengintegrasikan isu masyarakat adat ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), tetapi aparatur birokrasi di lapangan pada kenyataannya belum memiliki sensitivitas budaya yang memadai dalam menangkap aspirasi lokal . Pendekatan pelayanan yang sering diterapkan masih didominasi pola operasional searah (*top-down*), di mana birokrasi datang membawa paket program yang sudah jadi dan menuntut masyarakat adat menerimanya tanpa ruang intervensi yang kuat. Konsistensi disposisi birokrasi juga sering terganggu oleh tingginya frekuensi rotasi pejabat daerah yang menyebabkan program pemberdayaan sering kali terhenti di tengah jalan atau mengalami perubahan orientasi kebijakan . Realitas ini mencerminkan belum terjadinya transformasi paradigma dalam tubuh birokrasi dari pola pelayanan kaku menuju pendekatan berbasis pemenuhan hak-hak masyarakat hukum adat.

3.1.4 Dimensi Struktur Birokrasi

Struktur organisasi birokrasi di Kabupaten Kaimana masih mencerminkan ego sektoral yang kaku dan terfragmentasi. Koordinasi lintas sektor antar-SKPD dalam pelaksanaan program yang menyasar wilayah adat masih berjalan sendiri-sendiri tanpa adanya mekanisme integrasi yang sistematis, sehingga memicu tumpang tindih program pada satu lokasi dan kekosongan layanan pada wilayah lainnya. Penulis menemukan kelemahan struktural yang signifikan berupa absennya unit kerja khusus yang memiliki mandat formal untuk mengoordinasikan urusan masyarakat adat di dalam

arsitektur kelembagaan Bappeda. Ketiadaan unit khusus ini berimplikasi pada tidak fleksibelnya Standar Operasional Prosedur (SOP) birokrasi daerah, terutama dalam menyesuaikan prosedur pengadaan barang dan jasa dengan konteks kearifan lokal masyarakat setempat.

3.2 Bentuk Partisipasi Suku Asli Kaimana dalam Tahapan Pembangunan

3.2.1 Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan

Keterlibatan masyarakat suku asli Kaimana dalam perencanaan pembangunan daerah dinilai masih berada pada tingkat partisipasi semu atau sekadar *tokenism*. Kuantitas kehadiran tokoh adat dalam forum Musrenbang sebenarnya cukup tinggi di tingkat kampung, yaitu mencapai 78 persen, namun angka keterwakilan ini merosot tajam menjadi 45 persen di tingkat distrik, dan menyusut hingga tersisa 23 persen di tingkat kabupaten akibat kendala biaya akomodasi transportasi laut. Kualitas dari pengambilan keputusan tersebut juga sangat rendah karena kehadiran para tetua adat kerap kali ditempatkan sekadar sebagai simbol legitimasi seremonial. Dokumen notulen Musrenbang merekam fakta bahwa dari total 47 usulan pembangunan yang diajukan oleh delapan suku asli, pihak birokrasi kabupaten hanya mengakomodasi 9 usulan atau sekitar 19 persen saja ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dengan kecenderungan menolak usulan pemberdayaan ekonomi berbasis adat.

3.2.2 Partisipasi dalam Pelaksanaan

Keterlibatan masyarakat suku asli pada tahapan pengerjaan proyek pembangunan fisik di wilayah ulayat mereka terpantau sangat minimal. Mayoritas proyek pembangunan infrastruktur yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dikerjakan secara kontraktual oleh perusahaan luar yang membawa tenaga kerja sendiri, sedangkan warga lokal hanya ditempatkan sebagai buruh kasar harian dengan upah jangka pendek. Suku asli Kaimana sebenarnya memiliki modal sosial tradisional yang mandiri dan aktif dalam bentuk gotong royong atau kerja bakti adat untuk merawat lingkungan maupun fasilitas umum, tetapi potensi swadaya sosiologis ini belum diintegrasikan secara formal ke dalam sistem pelaksanaan program daerah. Pengecualian keberhasilan pelaksanaan program hanya dijumpai pada proyek kawasan kampung nelayan di wilayah adat Suku Namatota karena menghormati sistem pengetahuan lokal dan menempatkan kelembagaan tradisional sebagai mitra sejajar sejak awal pengerjaan.

3.2.3 Partisipasi dalam Menikmati Hasil

Dimensi partisipasi dalam menikmati hasil pembangunan menunjukkan adanya jurang ketimpangan yang lebar antara wilayah perkotaan dengan kampung-kampung adat di wilayah terpencil. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kaimana memperlihatkan bahwa angka kemiskinan di distrik pedalaman seperti Distrik Etna dan Distrik Yamor masih berada di atas 30 persen, berbanding terbalik dengan pusat kota Distrik Kaimana yang telah berhasil menekan angka kemiskinan hingga menyentuh level 12 persen. Pemenuhan hak fasilitas dasar seperti pemanfaatan air bersih yang layak, aliran listrik generator, serta fasilitas kesehatan sekunder belum dapat dinikmati secara merata oleh masyarakat pedalaman karena keterbatasan jangkauan infrastruktur. Walau demikian, terdapat beberapa *output* program otonomi khusus yang dirasakan berdampak positif oleh suku asli, di antaranya adalah alokasi program beasiswa pemuda Orang Asli Papua (OAP) untuk menempuh pendidikan tinggi serta pembangunan unit posyandu dan PAUD di tingkat kampung.

3.2.4 Partisipasi dalam Evaluasi

Tahapan partisipasi dalam evaluasi program diidentifikasi sebagai dimensi yang paling lemah dan belum terlembagakan secara baku di Kabupaten Kaimana. Pemerintah daerah sejauh ini belum menyediakan ruang atau saluran umpan balik (*feedback mechanism*) formal yang dapat diakses secara mudah oleh masyarakat hukum adat di tingkat tapak. Sistem pengaduan berbasis digital nasional seperti LAPOR terbukti mandul karena tidak didukung oleh ketersediaan jaringan internet di wilayah kepulauan terpencil. Saluran aspirasi yang selama ini berjalan secara kultural melalui pelaporan berjenjang dari kepala suku menuju kepala kampung kerap kali mengalami stagnasi dan tidak mendapatkan tindak lanjut konkret dari instansi birokrasi pelaksana karena ketiadaan SOP formal yang menjembatani keluhan dari jalur adat tersebut.

3.3. Diskusi Temuan Utama

Implementasi kebijakan otonomi daerah dan otonomi khusus di Kabupaten Kaimana memberikan potret empiris bahwa ketersediaan instrumen regulasi dan anggaran yang besar tidak serta-merta linear dengan terciptanya ruang partisipasi yang bermakna bagi masyarakat hukum adat. Penulis menemukan bahwa pola pendekatan birokrasi yang kaku menyebabkan keterlibatan delapan suku asli Kaimana tersudut pada level partisipasi semu (*tokenism*), di mana suara mereka didengar dalam forum formal tetapi diabaikan dalam keputusan final. Sama halnya dengan temuan dalam studi terdahulu bahwa perubahan atau pergantian kebijakan otonomi daerah sangat mungkin terjadi mengikuti rezim yang berkuasa, sehingga pemerintahan daerah yang kuat dan stabil masih merupakan sesuatu yang jauh dari harapan (Faisal, 2013). Gejala ketidakberhasilan operasional di Kabupaten Kaimana ini juga memperkuat teori pelaksana kebijakan dalam studi terdahulu bahwa pencapaian target otonomi daerah sangat bergantung pada keterikatan positif antara dimensi komunikasi yang jelas, kecukupan kapasitas sumber daya, disposisi pelaksana yang suportif, dan penguatan struktur birokrasi yang integratif (Salmawati dkk., 2024).

Berbeda dengan temuan dalam studi terdahulu di Kota Sorong yang menunjukkan bahwa tingkatan partisipasi masyarakat dapat dimobilisasi secara progresif melalui penguatan jaringan sosial dan pemberian dana stimulus (Sangkek dkk., 2017), realitas di Kabupaten Kaimana justru memperlihatkan terjadinya penurunan drastis keterwakilan akibat hambatan fisik dan biaya sosiologis yang ekstrem. Karakteristik wilayah Kaimana yang didominasi oleh kepulauan menyebabkan tokoh adat dari kampung terpencil harus menanggung biaya transportasi laut hingga mencapai Rp1.000.000,00 hanya untuk menghadiri forum perencanaan di pusat kabupaten, sehingga tingkat kehadiran merosot tajam dari 78 persen di tingkat kampung menjadi 23 persen di tingkat kabupaten. Meskipun demikian, temuan peneliti di lapangan mendukung rekomendasi strategis dari studi terdahulu mengenai urgensi pengangkatan fasilitator adat resmi di setiap distrik serta penyediaan pos anggaran khusus untuk dana transportasi peserta Musrenbang guna memotong jarak geografis antara birokrasi dan komunitas lokal (Sangkek dkk., 2017).

Temuan penelitian ini secara tegas menolak generalisasi sosiologis dari studi terdahulu yang menyatakan bahwa masyarakat adat cenderung memiliki kesadaran magis atau semi-intransitif yang membatasi kepedulian serta keterlibatan aktif mereka dalam agenda pembangunan formal pemerintah (Moenawar, 2019). Fakta empiris di Kabupaten Kaimana membuktikan bahwa delapan suku asli memiliki antusiasme internal yang sangat tinggi untuk mengawal pembangunan, yang tecermin dari tingginya kuantitas kehadiran awal di forum tapak serta bertahannya sistem swadaya gotong royong tradisi (*kerja bakti adat*) dalam merawat fasilitas publik. Rendahnya kualitas keterlibatan suku asli Kaimana bukan bersumber dari watak pasif komunitas, melainkan akibat penolakan struktural

birokrasi yang hanya mengakomodasi 19 persen usulan berbasis pengetahuan lokal, sehingga menolak hak kedaulatan aspirasi mereka ke dalam dokumen formal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Temuan ini memperkuat sekaligus memberikan koreksi kualitatif terhadap hasil studi kuantitatif terdahulu yang menyatakan bahwa era otonomi daerah secara linear mendorong peningkatan kualitas layanan publik dan pembangunan manusia melalui optimalisasi alokasi belanja pemerintah daerah yang tepat sasaran (Sasana, 2012). Melalui analisis deskriptif-analitis di Kabupaten Kaimana, besarnya alokasi belanja daerah dan ketersediaan Dana Otonomi Khusus yang mencapai Rp48.000.000.000,00 ternyata belum mampu menjamin pemerataan pelayanan publik akibat adanya fragmentasi kelembagaan dan ego sektoral antar-SKPD. Kegagalan birokrasi dalam menyinergikan anggaran desentralisasi dengan kebutuhan riil masyarakat adat ini memicu lahirnya jurang ketimpangan hasil pembangunan yang sangat tajam, di mana angka kemiskinan di distrik pedalaman seperti Distrik Etna dan Distrik Yamor masih bertengger di atas 30 persen, berbanding terbalik dengan pusat kota yang telah berhasil ditekan hingga menyentuh level 12 persen.

3.4. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan beberapa faktor pendukung yang menjadi modal sosiologis penting bagi peningkatan partisipasi suku asli Kaimana dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Faktor utama yang bersifat internal adalah masih kuatnya legitimasi institusi adat serta kepemimpinan tradisional, seperti *ondoafi* atau kepala suku, yang dihormati secara kolektif oleh komunitas setempat. Dukungan potensial ini diperkuat oleh faktor eksternal berupa ketersediaan alokasi Dana Otonomi Khusus sebagai sumber pendanaan spesifik serta adanya payung hukum formal, khususnya Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, yang menjamin perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat. Selain itu, kekayaan kearifan lokal dan sistem pengetahuan tradisional dalam tata kelola sumber daya alam, seperti praktik *sasi* kelautan dan pelestarian hutan, merupakan aset sosiologis berharga untuk mewujudkan perencanaan pembangunan berkelanjutan yang berbasis pada karakteristik lokal.

Penulis di sisi lain mengidentifikasi sejumlah faktor penghambat struktural dan kultural yang secara konsisten menekan tingkat serta kualitas keterlibatan suku asli Kaimana dalam siklus pembangunan. Kondisi geografis yang berat dengan bentang alam kepulauan, perbukitan, dan hutan tropis menjadi rintangan fisik nyata yang memicu tingginya biaya akomodasi transportasi, sehingga mengisolasi masyarakat pedalaman dari forum-forum perencanaan formal di pusat kabupaten. Hambatan sosiologis tersebut diperparah oleh rendahnya kapasitas sumber daya manusia masyarakat adat dalam bidang pendidikan formal, sehingga menciptakan keterbatasan literasi untuk berinteraksi dengan sistem perencanaan teknokratis yang digunakan oleh pemerintah daerah . Hambatan politis berupa dominasi elite lokal dalam forum musyawarah juga menyebabkan aspirasi warga biasa, terutama kelompok perempuan dan generasi muda, tidak tersampaikan dengan baik, yang diperumit oleh masih lemahnya pengakuan formal aparatur birokrasi terhadap eksistensi kelembagaan adat akibat adanya paradigma keliru yang memandang kearifan lokal sebagai penghambat modernisasi.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan otonomi daerah di Kabupaten Kaimana dalam mendorong partisipasi suku asli masih belum berjalan optimal pada seluruh dimensi implementasi sehingga menghasilkan tingkat keterlibatan masyarakat adat yang rendah dan baru sebatas partisipasi semu (*tokenism*). Rendahnya kualitas keterlibatan tersebut merupakan cerminan dari kebijakan tata kelola birokrasi daerah yang belum adaptif terhadap konteks sosial-budaya lokal akibat adanya dominasi komunikasi searah (*top-down*), fragmentasi struktur organisasi tanpa unit

khusus urusan adat, keterbatasan jangkauan infrastruktur, serta minimnya alokasi anggaran pemberdayaan dan fasilitator adat. Meskipun kelembagaan tradisional memiliki modal sosial yang kuat serta didukung anggaran Dana Otonomi Khusus, ruang partisipasi delapan suku asli pada tahapan pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, hingga evaluasi pembangunan tetap mengalami stagnasi akibat hambatan biaya geografis wilayah kepulauan yang ekstrem serta kesenjangan kapasitas pendidikan formal. Guna memutus siklus jebakan partisipasi rendah ini, disarankan bagi Pemerintah Kabupaten Kaimana untuk segera melakukan pengangkatan fasilitator adat di setiap distrik, meningkatkan proporsi Dana Otsus untuk klaster pemberdayaan adat menjadi minimal 25 persen, serta membentuk unit kerja khusus penanganan urusan adat sosiologis di bawah struktur kelembagaan Bappeda.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama pada cakupan lokus sosiologis yang hanya terbatas di wilayah administratif Kabupaten Kaimana sehingga generalisasi temuan untuk skala wilayah yang lebih luas harus dilakukan secara hati-hati. Desain penelitian ini juga murni menggunakan pendekatan kualitatif sehingga belum mampu mengukur tingkat, kecenderungan, dan hubungan antarvariabel partisipasi secara presisi secara numerik, serta belum mengkaji aspek ketimpangan gender dalam pola keterlibatan komunitas masyarakat adat secara mendalam.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih terbatasnya ruang lingkup temuan dalam penelitian ini, oleh karena itu penulis menyarankan agar dilakukan penelitian lanjutan yang bersifat komparatif dengan melibatkan beberapa kabupaten lain di Provinsi Papua Barat yang memiliki karakteristik serupa. Peneliti selanjutnya juga disarankan untuk mengintegrasikan pendekatan kuantitatif atau metode campuran (*mixed methods*), menjadikan aspek ketimpangan gender dalam ruang partisipasi masyarakat adat sebagai fokus utama kajian tersendiri, serta mendalami model pelembagaan hubungan formal yang ideal antara struktur pemerintah daerah dengan Dewan Adat.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Bupati Kaimana beserta jajaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung (DPMPK) Kabupaten Kaimana yang telah memberikan kesempatan serta fasilitas bagi penulis untuk melaksanakan kegiatan penelitian. Penulis juga menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang mendalam kepada Dewan Adat Kabupaten Kaimana, para kepala suku (*ondoafi*), tokoh masyarakat, serta seluruh warga suku asli Kaimana yang telah menyambut baik, bertindak sebagai informan, dan membantu menyukseskan pelaksanaan pengumpulan data di lapangan. Selanjutnya, ungkapan terima kasih yang tulus disampaikan kepada jajaran civitas akademika Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), khususnya kepada dosen pembimbing, Bapak Ely Sukmana, S.H., M.H., yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan bimbingan, masukan, perbaikan, serta motivasi hingga karya ilmiah ini dapat diselesaikan dengan baik.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Ardieansyah, Asmungi, & Latip. (2023). *Metode Penelitian Sosial* (1st ed.). Yogyakarta: Deepublish.

Arnstein, S. R. (1969). A Ladder Of Citizen Participation. *Journal of the American Institute of*

Planners, *35*(4), 216–224. https://doi.org/10.1080/01944366908977225
Bardhan, P. (2002). Decentralization of governance and development. *Journal of Economic Perspectives*, *16*(4), 185–205. https://doi.org/10.1257/089533002320951037
Cohen, J. M., & Uphoff, N. T. (1980). Participation's place in rural development: Seeking clarity through specificity. *World Development*, *8*(3), 213–235. https://doi.org/10.1016/0305-750X(80)90011-X
Cornwall, A. (2003). Whose voices? Whose choices? Reflections on gender and participatory development. *World Development*, *31*(8), 1325–1342. https://doi.org/10.1016/S0305-750X(03)00086-X
Crook, R. C. (2003). Decentralisation and poverty reduction in Africa: the politics of local–central relations. *Public Administration and Development*, *23*(1), 77–88. https://doi.org/10.1002/pad.261
Djohan, D., Khairi, H., & Alma'arif. (2024). *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Intelegensia Media.
Edwards III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington: Congressional Quarterly Press.
Faisal. (2013). Analisis implementasi kebijakan otonomi daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi*, *10*(3), 343–359. https://doi.org/10.31113/jia.v10i3.14
Friedmann, J. (1992). *Empowerment: The Politics of Alternative Development*. Cambridge: Blackwell Publishers.
Fung, A. (2006). Varieties of participation in complex governance. *Public Administration Review*, *66*(1), 66–75. https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2006.00667.x
Howlett, M., Ramesh, M., & Perl, A. (2020). *Studying Public Policy: Principles and Processes* (4th ed.). Oxford: Oxford University Press.
Jeddawi, M., Rossad, A., Rahman, A., Faisal, M., & Jamaruddin, J. (2025). Dialektika kemiskinan dengan desentralisasi fiskal Pemerintah Provinsi Papua. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, *51*(2), 121–135. https://ejournal.ipdn.ac.id/JIPWP/article/view/6054
Masrich, A., & Yahya, A. S. (2015). *Kebijakan Publik*. Jatinangor: IPDN.
Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). USA: Sage Publications.
Moenawar, M. G., Priatna, W. B., & Santoso, H. (2019). Consciousness raising dan partisipasi politik Suku Baduy di era digital (Tinjauan awal). *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, *17*(1), 69–80. https://journal.ipb.ac.id/jurnalkmp/article/view/26591
Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia.
Peters, B. G. (2021). *Advanced Introduction to Public Policy*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited.
Ribot, J. C., & Peluso, N. L. (2003). A Theory of Access. *Rural Sociology*, *68*(2), 153–181. https://doi.org/10.1111/j.1549-0831.2003.tb00133.x
Salmawati, S., Purnomo, A., Nikmatul Ula, S. N., Rais, L., & Ikhwan, S. (2024). Dampak otonomi khusus pada ekonomi orang asli Papua setelah implementasi kebijakan pemerintahan. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, *10*(1), 214–222. https://doi.org/10.33506/jn.v10i1.3461
Sangkek, Y., Amiruddin, A., & Purnomo, A. (2017). Pengaruh otonomi khusus terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kota Sorong. *Jurnal GRADUAL: Governance Administration and Public Service*, *6*(2), 54–65. https://ejournal.um-sorong.ac.id/index.php/gl/article/view/602
Sasana, H. (2012). Pengaruh belanja pemerintah daerah dan pendapatan perkapita terhadap indeks pembangunan manusia (Studi kasus di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah). *Media*

Ekonomi Dan Manajemen, *25*(1), 1–12. https://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/fe/article/view/183/244

Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan: Teoritik, Legalistik, Empirik dan Inovatif* (3rd ed.). Bandung: Alfabeta.

Sinurat, M., Panjaitan, H. M., & Komaedi. (2025). *Perencanaan dan Penganggaran Daerah*. Bandung: Pustaka Rahmat.

Sutiyo, S., Polyando, P., Aser, F., & Ilham, T. (2024). Relasi adat dan pemerintahan di Papua Selatan: Analisis Kelembagaan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, *50*(1), 91–99. https://doi.org/10.33701/jipwp.v50i1.4064

INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
1956